

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

² Satjipto Rahardjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, CV. Sinar Baru. Hal. 24

Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama³. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum

³ *Ibid*, hal 30

kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa :

1) Non Penal

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum⁴.

⁴ Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22

1. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁵

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

⁵ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hal. 8

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahguna

1) Pengertian Penyalahguna

a. Penyalahguna menurut kamus

Definisi penyalahgunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata salah guna, menyalahgunakan yaitu melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan, oknum itu telah fasilitas pemerintah yg diberikan kepadanya, penyalahgunaann proses, cara, perbuatan menyalahgunakan penyelewengan.⁶ peyalahgunaan sering dikaitkan terhadap obyek obyek seperti jabatan, wewenang ataupun terhadap Narkotika. Sehingga jika kata penyalahgunaan memiliki arti baik berupa proses, cara maupun perbuatan menyalahgunakan terhadap sesuatu yang tidak semestinya.

⁶ Dendy Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Hlm 1248

b. Menurut ahli dan WHO

Menurut Gordon Penyalahguna adalah seorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spritual. Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya.⁷

Paul D. Meier mengatakan penyalahguna adalah. cara menggunakan obat hanya untuk kesenangan pribadi atau golongan saja. Menurut Paul D. Meier Penyalahgunaan obat (*drug abuse*) adalah pemakaian obat diluar petunjuk dokter. Obat jenis ini adalah obat yang dapat menimbulkan efek perasaan yang senang (*euphoria*) yang biasanya dapat membuat candu.⁸ Maka dapat diartikan penyalaguna adalah penggunaan atau pemakaian obat diluar petunjuk resep dokter untuk mendapatkan efek berupa perasaan senang (*euphoria*) yang dampaknya akan membuat candu.

Widjono, mendefinisikan penyalahgunaan narkotika sebagai pemakaian obat secara terus-menerus, atau sesekali tetapi berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran⁹

Terkait Penyalahgunaan *World Health Organisation (WHO)* mendefinisikan terkait masalah penyalahgunnaan terhadap obat.

⁷ Ina Afiatin, 2008, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.13

⁸ Widyastuti, Y. Intensitas Hubungan Keluarga dan Kecenderungan Memakai Obat Terlarang pada Pemuda di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. 2012; 22: 112-118

⁹ Ina Afiatin, 2008, Opcit, Hlm 14 .

Penyalahgunaan obat menurut *World Health Organisation (WHO)* adalah penggunaan zat atau obat-obatan kimia yang tidak ditujukan untuk pengobatan atau medikasi, akan tetapi obat-obatan tersebut digunakan untuk mendapatkan kenikmatan. Pengertian lain yang diperoleh terhadap definisi Penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dimaksud bila suatu obat digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencari atau mencapai kesadaran tertentu karena pengaruh obat pada jiwa.

2) Penyalahgunaan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

a. Menurut Undang-Undang

Pengertian penyalahgunaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 yaitu “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”. Maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang karena yang diluar dari pengawasan tenaga ahli maupun pihak yang berwenang untuk mencapai situasi maupun kondisi yang diinginkan pengguna. Penyalahgunaan narkotika sebagai

pemakaian obat secara terus-menerus, atau sesekali tetapi berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran.¹⁰

b. Menurut Peraturan Menteri

Penegertian Penyalahguna tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Penyalahgunaan Narkotika dalam pasal 1 ayat (6) yaitu "*Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*". Dari penjelasan pasal tersebut penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika secara melawan hukum dan tanpa hak. Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- b. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.¹¹

C. Tinjauan Umum Tentang Obat Keras

1) Pengertian Obat Keras

Definisi terkait obat juga tertuang dalam pasal 1 ayat (8) Undang

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dijelaskan :

¹⁰ Ina Afiatin, 2008, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Program AJI, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.13.

¹¹ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Bandung. Citra Aditya Bakti hal. 354-355

“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”

Menurut Ansel, obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohani pada manusia atau hewan termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.¹²

Obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, maka farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya. Namun untuk seorang dokter, ilmu ini dibatasi tujuannya yaitu agar dapat menggunakan obat untuk maksud pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Selain itu, agar mengerti bahwa penggunaan obat dapat mengakibatkan berbagai gejala penyakit.

Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf “K” di tengahnya yang menyentuh garis

¹² Anief, *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada University Press halaman 3

tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotek dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya.¹³

Obat keras merupakan obat yang dalam peredarannya maupun penjualannya dibatasi hanya menggunakan resep dokter. Obat keras tersebut dilarang diperjual belikan secara bebas tanpa menggunakan resep agar tidak terjadi penyalahgunaan. Karena efek yang ditimbulkan dari obat keras tersebut bisa menyebabkan kecanduan dan lain lain.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan penjelasan mengenai kemasan untuk memperjelas terkait obat keras yang di jelaskan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 tentang Kemasan Khusus Obat Keras Daftar G. Obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Dalam Pasal 2 adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 tentang Kemasan Khusus Obat Keras menjelaskan:¹⁴

- (1) Pada etiket dan bungkus luar obat yang tergolong obat keras harus dicatumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras*
- (2) Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977*

¹³ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Informatorium Obat Nasional Indonesia 2008 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, (Jakarta: BPOM-RI, 2009), hal. 1

¹⁴ Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 tentang Kemasan Khusus Obat Keras

- (3) Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar

Kemudian dalam pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 tentang Kemasan Khusus Obat Keras Daftar G menjelaskan :¹⁵

- (1) Tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi
- (2) Tanda khusus untuk obat keras dimaksud dalam ayat (1) harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenali
- (3) Ukuran lingkaran tanda khusus dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan ukuran dan desain etiket dan bungkus luar yang bersangkutan dengan ukuran diameter lingkaran terluar, tebal garis tebal dan tebal huruf K yang proporsional, berturut-turut minimal satu cm, satu mm dan satu mm
- (4) Penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (4) harus mendapatkan persetujuan khusus dari Menteri Kesehatan cq. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan

2. Daftar Jenis Obat Keras

Di masyarakat banyak obat keras yang beredar. purwanto hardjosaputra dalam bukunya menggolongkan beberapa obat keras yang banyak ditemukan dan dikenal di masyarakat diantaranya adalah :

1. Obat anti mual seperti *Metoklopramid HCL* dan lain-lain.
2. Obat obat pencahar seperti *bisacodil (dulcolax)*, dan lain-lain).
3. Obat sakit/kejang perut seperti golongan *Hyosine N-butylbromide (buscopan)*, dan lain-lain).
4. Golongan obat asma seperti *aminophyline, salbutamol*, dan lain-lain.
5. Obat penghilang nyeri dan rematik seperti *asam mefenamat (ponstan, mectan)*, dan lain-lain), *ibuprofen, piroksikam*, dll.

¹⁵ Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 tentang Kemasan Khusus Obat Keras

6. Obat *Antihistamin* seperti *dimenhidrinat* (antimo, dan lain-lain), *Dexchlorphynrimine maleat* (CTM, dan lain-lain).
7. Obat obat Anti jamur seperti *Nistatin*, *mekonazol*.
8. Obat obat pemutih kulit seperti *hidroquinon*, dan lain-lain.
9. Golongan Kortikosteroid seperti *dexamethasone*, *prednisone*, dan lain-lain.
10. obat-obat lambung seperti *cimetidine*, *ranitidine*, dan lain-lain.
11. Obat obat Asam urat seperti *Allopurinol*, dan lain-lain.
12. Obat obat Anti diabetika (Kencing manis) seperti *glibenclamid*, *metformin*, dan lain-lain.
13. Obat-obat anti hipertensi seperti *captopril*, *reserpin*, *HCT*, *nifedipin*, dan lain-lain.¹⁶

Obat keras yang disalahgunakan ini sudah dikeluarkan dari kardus yang bertanda obat keras oleh oknum apotik atau toko obat. Kecenderungan para pelajar dan mahasiswa menggunakan obat keras lantaran harganya lebih murah dari narkoba. Selain itu, obat keras disukai para pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kepercayaan diri bahkan untuk melakukan tindakan kejahatan. Penggunaan obat untuk penyakit syaraf/kejiwaan oleh orang sehat bisa berbahaya, begitu juga obat anti nyeri/sakit digunakan pada badan sehat bisa memanipulasi syaraf tubuh yang berdampak kematian.

Obat keras yang paling laris dan sering disalahgunakan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa :¹⁷

1. *Xanax (amprazolam)*
2. *Klonopin*
3. *Valium*
4. *Oxycodone*
5. *Demerol*
6. *Darvocet*

¹⁶purwanto hardjosaputra, 2008. "daftar obat indonesia edisi ii", Yogyakarta hlm 55

¹⁷ Redaktor, 2018. *Obat Yang Sering Disalahgunakan*. PT. Tunas Intermedia Globe, <https://indopos.co.id>, diakses 28 Desember 2018

7. *Kodein*
8. *Amfetamin*
9. *Ratalin*
10. *Tramadol*
11. *Trihexyphenidyl*
12. *Somadril atau Carisoprasdol*

3. Efek Yang di Timbulkan Obat Keras

Penggunaan Obat keras tentu saja memiliki efek samping. Efek samping yang di timbulkan tersebut seringkali disalahgunakan guna kepentingan para pelaku penyalahguna. Efek samping yang umum terjadi terhadap penyalahgunaan obat keras diantaranya:

- 1) Gangguan sistem kekebalan tubuh: Hipersensitivitas.
- 2) Gangguan kejiwaan: Kekhawatiran, gelisah, kebingungan, agitasi, *delusi*, *halusinasi*, *insomnia*, terutama pada orang tua dan penderita *arteriosclerosis*. Apabila mengakibatkan gangguan kejiwaan, maka pemakaian obat harus dihentikan.
- 3) *Euforia* yang berlebihan.
- 4) Gangguan sistem saraf: Pusing. Penurunan fungsi memori dalam jangka pendek. Memburuknya *miastenia gravis*.
- 5) Kelainan mata: pupil membesar dengan kehilangan akomodasi dan fotofobia, meningkatkan tekanan *intraokular*.
- 6) Gangguan jantung: Takikardia. Gangguan pernapasan, *toraks* dan *mediastinum* : Mengurangi *sekresi bronkial*.
- 7) Gangguan *gastrointestinal*: Mulut kering, sembelit, mual, muntah. Gangguan jaringan kulit dan subkutan: kulit kering dan memerah, ruam kulit.
- 8) Gangguan ginjal dan urin: Retensi urin, sulit buang air kecil.
- 9) Gangguan umum: Haus, *pireksia*.¹⁸

Efek samping yang ditimbulkan obat keras berupa euforia (perasaan senang) yang berlebihan, munculnya delusi (a false belief atau keyakinan

¹⁸ Tugi widi, 2018, *Trihexyphenidyl: Sebenarnya Obat Apa, Mengapa Disalahgunakan?*, Swara Gunung Kidul, www.medikus.com. Diakses 11 Januari 2019

keliru yang sulit dibantah), munculnya halusinasi (adanya respon tanpa adanya rangsangan) inilah yang dimanfaatkan oleh individu yang menyalahgunakan obat ini. Sesungguhnya, tidak ada seorang pun yang ingin mengkonsumsi obat yang tidak diperlukan secara medis. Oleh karena itu, penyalahgunaan obat termasuk penyalahgunaan obat keras ini sesungguhnya menunjukkan, bahwa ada permasalahan mendasar yang sedang dihadapi oleh individu tersebut.

4. Peredaran

Dalam Undang kesehatan peraturan terkait peredaran obat diatur dalam pasal 98 ayat 2 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

Dari penjelasan pasal diatas jelas bahwa seseorang yang tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat. Hal tersebut mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan obat obatan.

Pada pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”¹⁹

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Pasal tersebut menjadi landasan dalam penindakan peredaran obat keras yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani kasus obat keras.

Dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi dijelaskan :

(1) Penyerahan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;*
- b. Puskesmas;*
- c. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;*
- d. Instalasi Farmasi Klinik;*
- e. dokter; dan*
- f. Toko Obat²⁰*

Kemudian dalam pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi dijelaskan :

¹⁹ Lihat pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

²⁰ pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi

“Penyerahan Prekursor Farmasi golongan obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah Prekursor Farmasi golongan obat keras berdasarkan resep yang telah diterima.”²¹

Dijelaskan dalam pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi tersebut bahwa penyerahan prekursor farmasi terkait obat keras hanya boleh dilakukan oleh pihak pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian khusus. Untuk menghindari berbagai macam penyalahgunaan dan peredaran secara bebas terkait obat keras.

²¹ 22 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi